DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN

EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Periode 18 s.d. 29 Januari 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi Subandono • Sugiyarto • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Aktivitas Perekonomian Berdasarkan *Mobility Index*

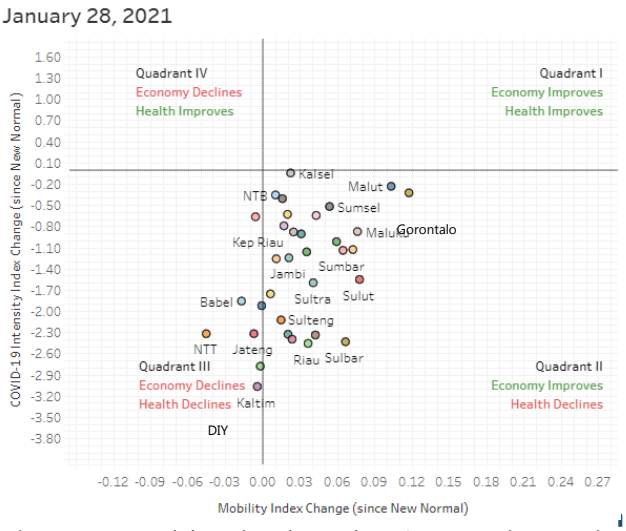

- Aktivitas perekonomian, berdasarkan *mobility index*,* mengalami penurunan dalam jangka waktu 15 Januari sampai dengan 28 Januari 2021, yaitu dari -0,084 menjadi -0,110.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan *COVID-19 intensity index change,* **tidak ada provinsi** yang masuk ke dalam **kuadran I** (keadaan kesehatan dan ekonomi membaik). Provinsi yang posisinya paling **dekat dengan kuadran I** adalah **Kalimantan Selatan, Maluku Utara,** dan **Gorontalo.** Sedangkan provinsi yang berada di bagian **bawah kuadran III** (kondisi kesehatan dan ekonomi memburuk) adalah **Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Jawa Timur,** dan **Nusa Tenggara Timur.**

*Data CSIS

KINERJA TKDD DAERAH

Alokasi dan Realisasi TKDD 2021

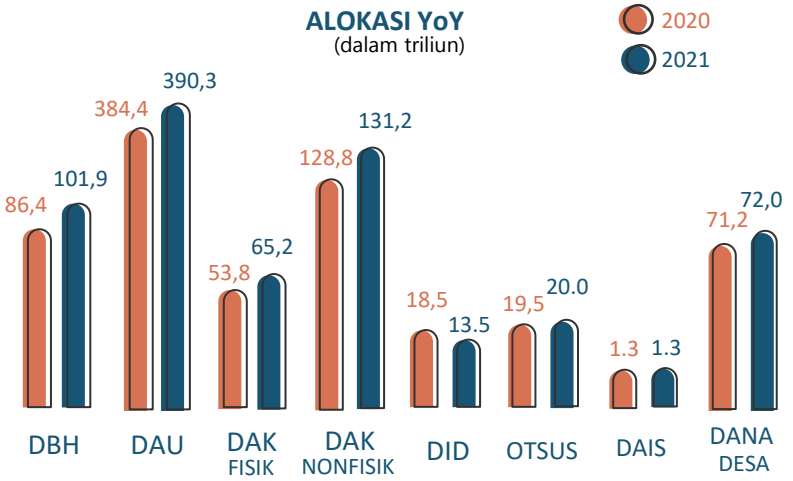

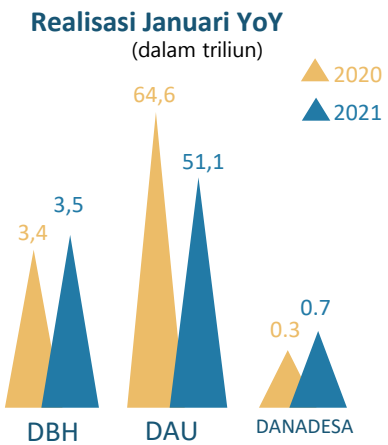

- Alokasi TKDD 2021 sebesar Rp795,50 T atau naik 4,13% dari alokasi 2020 sebesar Rp763,93 T.
- Hampir seluruh jenis TKDD mengalami kenaikan, kecuali DID yang turun sebesar 27,03%. Kenaikan TKDD tertinggi terdapat di DAK Fisik sebesar 21,31% dan diikuti oleh DBH sebesar 17,99%.

- Secara YoY, realisasi **Januari 2021** sebesar Rp55,30 T mengalami **penurunan 20,14%** dibandingkan realisasi Januari 2020 sebesar 68,39 T. **Penurunan terbesar** bersumber dari **DAU sebesar 20,91%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja penyaluran DAU Februari 2021.
- Realisasi BLT sebesar Rp41,20 M kepada 1.930 Desa.

KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja APBD Pulau Jawa

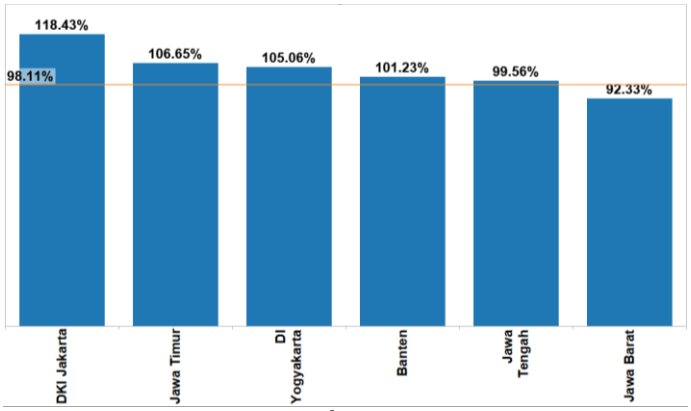

Pendapatan

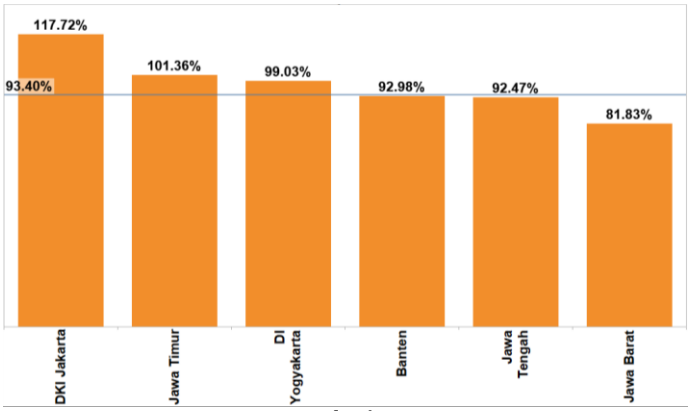

Belanja

Hampir seluruh Provinsi di Pulau Jawa, **kecuali Jawa Barat**, mempunyai **realisasi pendapatan** TA 2020 agregat yang **lebih tinggi dari angka Nasional** sebesar **98,11%** dari Anggaran Penyesuaian. Namun untuk **realisasi belanja** agregat, hanya **DKI Jakarta, Jawa Timur,** dan **DI Yogyakarta** yang realisasinya **di atas angka Nasional** sebesar **93,40%**.

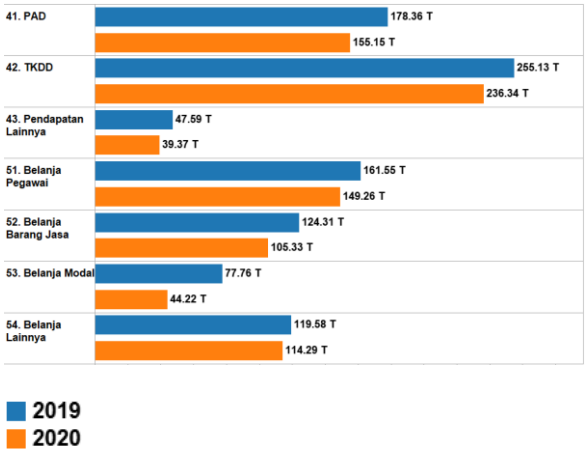

- Secara YoY, realisasi **pendapatan** di Jawa mengalami **penurunan 10,44%,** lebih rendah dari penurunan **Nasional** sebesar **13,29%**. Sedangkan **penurunan belanja** sebesar **14,51%** yang juga lebih rendah dari penurunan **Nasional** sebesar **15,18%**.
- Salah satu sumber **penurunan** pendapatan adalah penurunan **PAD**, yaitu sebesar **13,01%**. **Penurunan pajak daerah** terutama yang **berbasis konsumsi** menjadi penyebab utama, seperti penurunan **Pajak Hiburan 69,23%, Pajak Hotel 52,57%, Pajak Restoran 40,11%, BBNKB 25,62%,** dan **PBBKB 17,93%**.
- Hampir **seluruh komponen belanja** mengalami **penurunan**, **kecuali Belanja Subsidi naik 27,40%, Belanja Bansos naik 3,94%,** dan **Belanja Tak Terduga naik 6732,34%**, sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi di 2020.

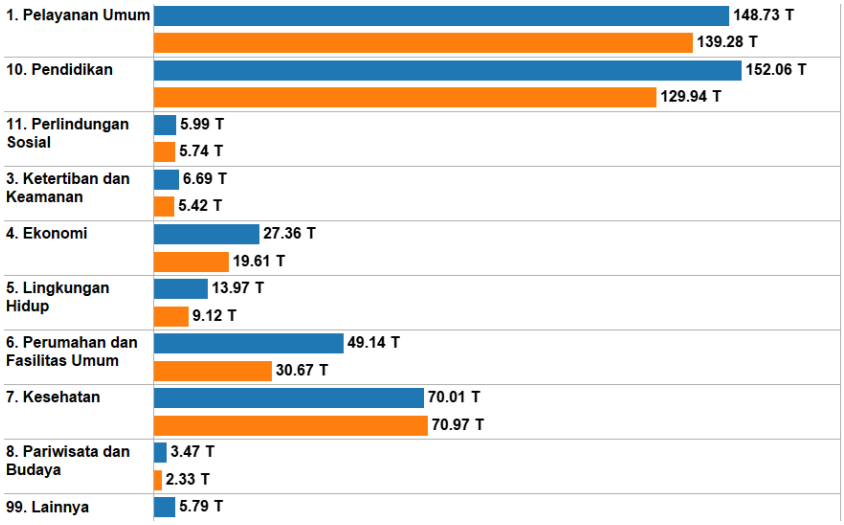

- **Hampir seluruh belanja per fungsi** mengalami **penurunan** realisasi secara YoY, **kecuali Belanja Fungsi Kesehatan** yang mengalami sedikit kenaikan dari Rp70,01 T (2019) menjadi Rp70,97 T (2020) atau naik sebesar **1,38%.**
- Sedangkan belanja yang mengalami **penurunan terbesar** adalah **Perumahan dan Fasilitas Umum** sebesar 37,59%, **Lingkungan Hidup** 34,71%, dan **Pariwisata dan Budaya** sebesar 32,74%. Hal ini sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi di 2020, terutama di Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum dengan banyaknya proyek pembangunan fisik yang ditunda pelaksanaannya.

*Realisasi 2020 masih sangat sementara per 22 Januari 2021

KINERJA LAYANAN PARIWISATA

Tingkat Hunian Hotel

Pada bulan November 2020, tingkat hunian hotel Indonesia mencapai **40,14%**. Angka ini mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan pada capaian bulan April yang hanya sebesar **12,67%** sebagai dampak PSBB di awal pandemi Covid-19.

Provinsi dengan Tingkat Hunian Hotel Tertinggi

per November 2020

1.	Lampung	59,14%
2.	Gorontalo	58,80%
3.	Kalimantan Tengah	58,21%
4.	Papua	55,22%
5.	Kalimantan Timur	54,76%

Provinsi dengan Tingkat Hunian Hotel Terendah

per November 2020

1.	Bali	9,32%
2.	Kep. Riau	24,64%
3.	Kep. Bangka Belitung	28,42%
4.	Sumatera Utara	34,41%
5.	Nusa Tenggara Barat	37,30%

Jika dibandingkan capaian November 2019 (YoY), maka secara nasional tingkat hunian hotel mengalami penurunan **-18,44%**. Penurunan ini terjadi hampir pada seluruh daerah kecuali Gorontalo dan Kalimantan Utara. Adapun penurunan terbesar dirasakan di Bali dan Kep. Riau yang mengalami penurunan tingkat hunian hotel lebih dari -30%.

Penurunan Tingkat Hunian Hotel (YoY)

per November 2020

1.	Bali	-50,14%
2.	Kep. Riau	-31,92%
3.	Bengkulu	-23,87%
4.	Maluku Utara	-22,51%
5.	DI Yogyakarta	-18,94%

Kenaikan Tingkat Hunian Hotel (YoY)

per November 2020

1.	Gorontalo	10,01%
2.	Kalimantan Utara	0,16%

Traffic Penumpang Pesawat Berdasarkan Bandara di Indonesia

Berdasarkan data dari 5 bandara terbesar di Indonesia, pada bulan Juni 2020 terjadi penurunan sebesar 90% dibandingkan data tahun sebelumnya di bulan yang sama dengan penurunan tertinggi terjadi di **Bandara Ngurah Rai sebesar 97,52%**.

Bandara	Juni 2020	YoY
Polonia	28.567	-88,38%
Soekarno Hatta	174.352	-88,89%
Juanda	64.137	-89,43%
Ngurah Rai	**11.396**	**-97,52%**
Hassanudin	40.508	-86,78%

Trend Penumpang Domestik Tahun 2020

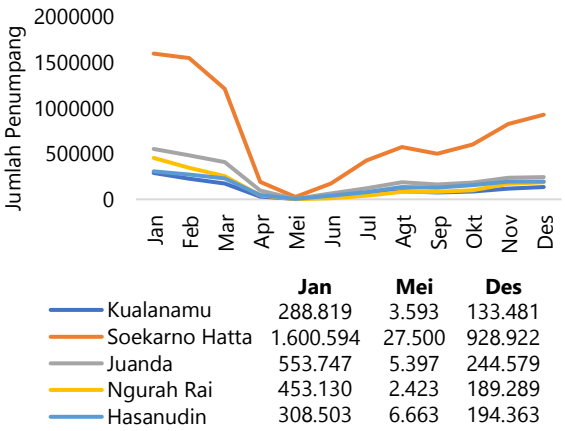

	Jan	Mei	Des
Kualanamu	288.819	3.593	133.481
Soekarno Hatta	1.600.594	27.500	928.922
Juanda	553.747	5.397	244.579
Ngurah Rai	453.130	2.423	189.289
Hasanudin	308.503	6.663	194.363

Wisatawan Mancanegara

Dibandingkan bulan Januari 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara di Indonesia mengalami penurunan sebesar 95% sampai dengan bulan November 2020.

TOP 5

per November 2020 (orang)

1.	Soekarno Hatta	36.668
2.	Juanda	2.434
3.	Sam Ratulangi	1.582
4.	Kualanamu	1.366
5.	Lombok	1.113

Top 5 Daerah Dengan Penurunan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Terbesar

No	Daerah	2019		2020		YoY %PHR/Pendapatan Daerah (2019-2020)	Provinsi*	Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - PDRB (Q3 YoY 2019-2020)	% Kasus Meninggal/ Kasus Positif (Rata2 nasional=2,82 %) -per 27 Jan 2021
		Pajak Hotel dan Restoran (PHR) (Rp Miliar)	%PHR/ Pendapatan Daerah	PHR (Rp Miliar)	%PHR/ Pendapatan Daerah				
1	Kab. Badung	3.209	55.39%	926	24.83%	-30.56%	Bali	-34.65%	2.62%
2	Kab. Gianyar	457	19.81%	130	6.89%	-12.91%			
3	Kota Denpasar	358	16.33%	147	7.58%	-8.75%			
4	Kab. Bintan	142	10.75%	38	3.79%	-6.96%	Kepulauan Riau	-43.77%	2.47%
5	Kota Yogyakarta	225	12.72%	122	7.17%	-5.55%	DI Yogyakarta	-18.80%	2.32%

**data laju pertumbuhan sektor PDRB dan Kasus Covid-19 mengunakan data level provinsi*

EDITORIAL

"The world is a book, and those who don't travel read only one page."
- St. Augustine

Quote di atas menggambarkan bagaimana minat masyarakat semakin besar dalam dunia pariwisata. Mengunjungi tempat-tempat asing yang memiliki nilai tinggi, bertemu dengan berbagai macam karakter, dan menikmati suasana alam, memiliki daya tarik tersendiri buat para *traveler.* Menurut *World Travel & Tourism Council* (2021), pada tahun 2019 dunia pariwisata berkontribusi sebesar 10,3% (USD 8,9 triliun) dari global GDP, dan 1 dari 10 pekerjaan di dunia adalah di bidang pariwisata. Untuk Indonesia, pariwisata menyumbang sebesar 4,11% dari PDB di tahun 2017 (BPS, 2021).

Namun kemudian, pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata Indonesia terpuruk. Penurunan pariwisata di Bali dimulai dengan ditutupnya penerbangan dari dan ke Cina pada 5 Februari 2020, yang menyebabkan sekitar 22.000 wisatawan Tiongkok membatalkan kunjungannya. Dengan adanya kebijakan PSBB, pelarangan mudik, dan slogan "di rumah saja", semakin membuat para pelaku industri pariwisata terpukul. Per Juni 2020, industri penerbangan Indonesia kehilangan pendapatan sekitar USD 4 miliar, hotel dan restoran merugi sebesar USD 1,5 miliar. Pemda pun terkena imbasnya, karena Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) berkontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperkirakan Pemda di 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia akan mengalami penurunan Pajak Hotel dan Restoran mencapai minimal 50%.

Dengan tantangan tersebut, sektor pariwisata perlu untuk menerapkan beberapa strategi utama, yaitu:

1

Put the People First

Hal terpenting adalah membuat wisatawan lebih percaya diri dan tidak merasa khawatir untuk berwisata. Ada tiga poin penting dalam strategi ini: (i) *health and hygiene* dengan memastikan protokol kesehatan dan kebersihan di hotel dan objek wisata destinasi atau atraksi berjalan dengan ketat, (ii) *safety and security*, melalui penyusunan rencana darurat dan penanganan sektor pariwisata yang mencakup masalah keamanan dan keselamatan wisatawan, dan (iii) *capacity building* melalui peningkatan kemampuan SDM berupa bimbingan teknis dan pelatihan berbasis dalam jaringan.

2

Aktivasi Kanal Komunikasi *Recovery* Yang Efektif

Strategi ini dilakukan dengan membangun strategi komunikasi dan resiliensi kolektif komunitas pada SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, melakukan eksekusi secara bertahap kampanye komunikasi untuk menghadapi situasi New Normal, dan menjaga stabilitas citra positif melalui manajemen reputasi pariwisata.

3

Stimulus permintaan

Menciptakan situasi yang membuat calon wisatawan jadi terdorong untuk membuat rencana berwisata, misalnya menciptakan ketersediaan waktu, penurunan harga, keringanan pajak, dan pemberian rasa aman kepada wisatawan.

4

Fokus pada destinasi utama

dan **utamakan wisatawan nusantara** untuk menjadi pasar utama

5

Fokus pada 3 sub-sektor utama

Yaitu kuliner, fashion, dan kriya, karena memiliki kontribusi ekonomi yang paling besar, berfungsi sebagai pemicu sekaligus lokomotif pariwisata di destinasi. Ketiga sub-sektor ini sangat cocok untuk para wisatawan yang melakukan pariwisata *leisure.* Tak itu saja, baik kuliner, fashion, dan kriya juga sangat bisa dijual dengan cara daring atau lewat *e-commerce* sehingga mudah menjaring pelanggan.

EDITORIAL

Dalam rangka membantu Pemda dan pelaku industri untuk menjalankan strategi pemulihan sektor pariwisata tersebut, Pemerintah mengalokasikan hibah pariwisata sebesar Rp. 3,3 Triliun. Hibah pariwisata tersebut merupakan *safety net* bagi industri pariwisata (hotel dan restoran) dan bantuan kepada Pemda untuk menyiapkan lingkungan wisata yang bersih, sehat, dan sesuai protap covid 19. Diharapkan melalui penyiapan lingkungan wisata tersebut, dapat menggerakkan kembali kegiatan di sektor pariwisata.

Alokasi, Realisasi, dan Persentase Penyaluran Hibah Pariwisata

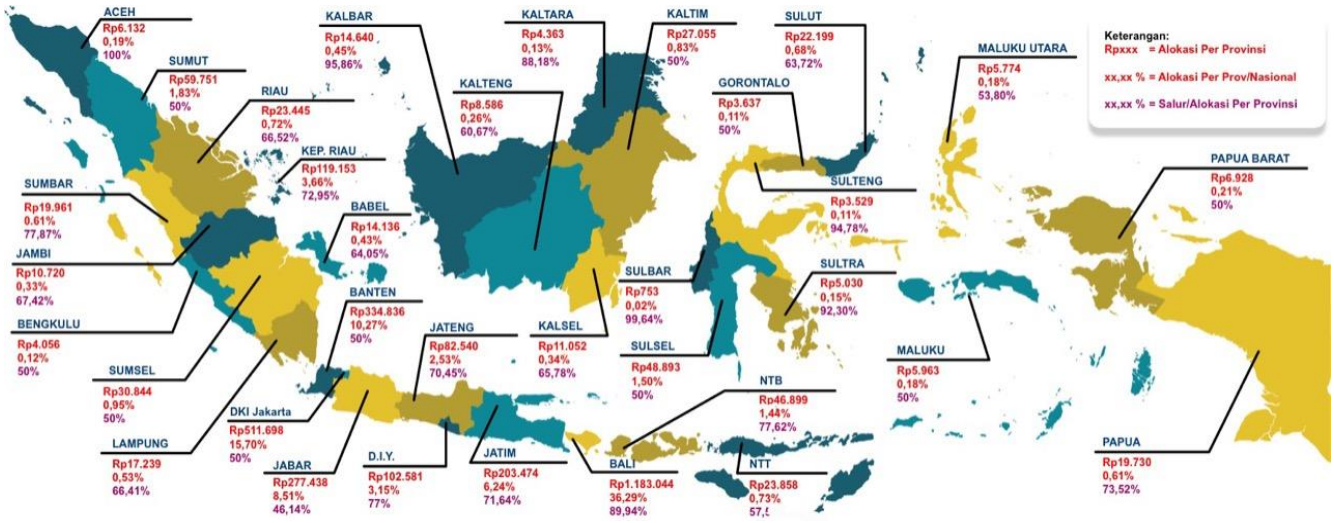

Daerah dengan Alokasi Tertinggi

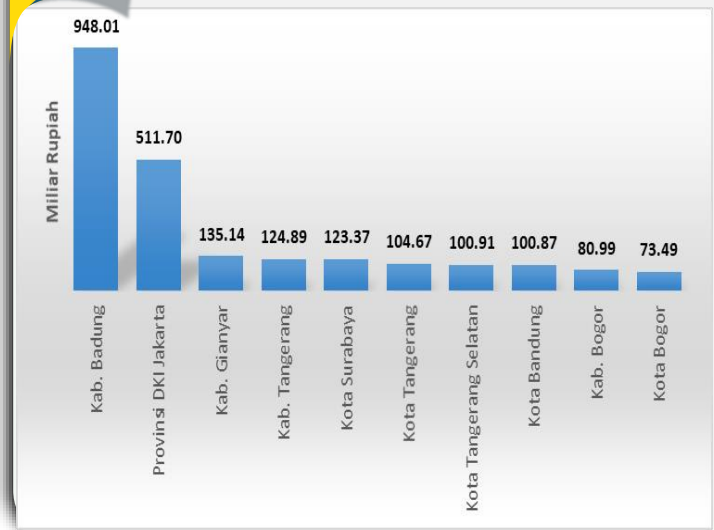

10 Daerah dengan Persentase Penyaluran Tertinggi

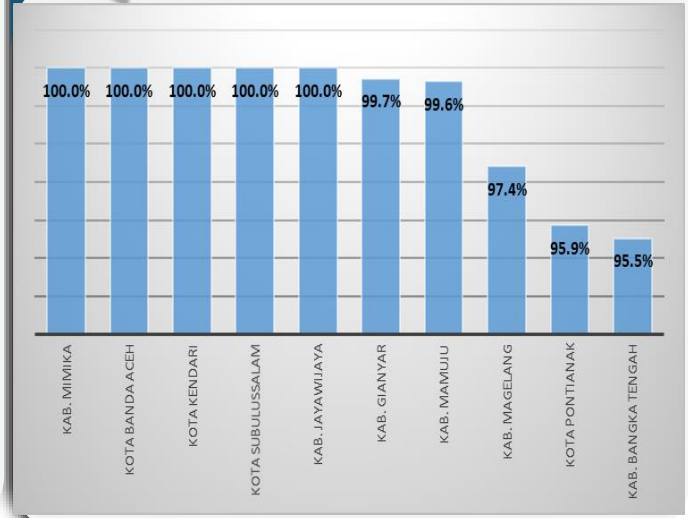

INOVASI DAERAH

Strategi Optimalisasi Potensi Pariwisata Saat Pandemi Di Kab. Banyuwangi

> *"It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change"*
>
> (Charles Darwin)

Sumber daya alam yang dapat dieksplorasi semakin lama semakin terbatas, disisi lain persaingan dalam memperoleh devisa dalam era globalisasi juga semakin ketat. Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia adalah mencari peluang lain dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada, antara lain pengembangan sektor pariwisata.

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi dan peluang sangat besar di sektor pariwisata adalah Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi mempunyai Obyek/Daya Tarik Wisata (ODTW) yang sangat beragam meliputi obyek wisata Pantai/Laut, Pegunungan/Gunung/Hutan/Satwa/Tumbuhan Langka, Air Terjun dan lainnya. Selain itu secara fisik wilayah, Banyuwangi sangat dekat dengan Pulau Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata di tingkat dunia secara tidak langsung akan berpengaruh pada perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi menjadi salah satu kota yang berhasil memajukan pariwisata. Banyuwangi menyabet gelar Kabupaten Terinovatif dalam kompetisi Innovative Goverment Award (IGA) 2019 oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kegiatan Banyuwangi Festival termasuk dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kemenpan RB. Berkembangnya pariwisata Banyuwangi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi.

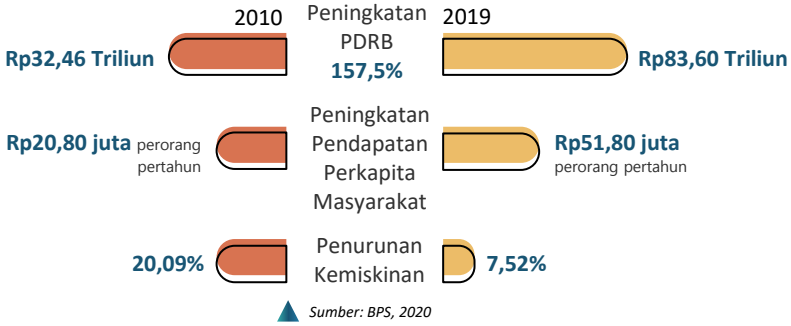

Sumber: BPS, 2020

Salah satu kunci berhasilnya pariwisata di Banyuwangi adalah inovasi dengan didukung oleh birokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, seperti halnya daerah lain, pandemi COVID-19 menyebabkan terancamnya sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Jumlah wisatawan yang meningkat signifikan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan drastis hingga semester I tahun 2020 dimana terlihat dari tingkat hunian kamar hanya mencapai 28,6 % pada bulan Juni 2020.

Namun, yang menarik adalah proses *rebound* sektor pariwisata di Banyuwangi termasuk kategori yang cepat. Data dari BPS (2021) menunjukkan, bahwa sejak bulan Agustus tahun 2020, tingkat okupansi kamar hotel kembali meningkat sangat tajam. Angka per November 2020 menunjukkan tingkat hunian kamar sebesar 53,26% bahkan lebih tinggi jika dibandingkan pada bulan Januari sebelum pandemi sebesar 51.1%. Untuk itu, eksplorasi bagaimana Banyuwangi dengan cepat memulihkan sektor pariwisata penting untuk dibahas.

Strategi *Recovery* Sektor Pariwisata

Dalam menghadapi masa pandemi, pemkab Banyuwangi telah mengantisipasi dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan para stakeholder seperti pemilik destinasi, rumah makan dan industri lainnya. Dalam masa pandemi, pola usaha dalam sektor pariwisata dilakukan perubahan. Jika sebelum pandemi yang dijual adalah atraksi kegiatan-kegiatan wisata, setelah pandemi yang diutamakan adalah kesehatan dengan penerapan protokol secara ketat melalui **Sertifikasi UMKM** seperti restoran dan warung, termasuk sanksi kepada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, juga dilakukan edukasi kembali kepada *tour guide* terkait penerapan protokol kesehatan, sehingga diharapkan semua dapat mengikuti perubahan pola usaha dalam sektor pariwisata.

Selain menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata, Banyuwangi juga memperketat datangnya wisatawan di pintu-pintu masuk dengan mewajibkan hasil rapid test Covid-19. Wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi dibatasi dengan difasilitasi aplikasi online. Tujuan dari semua hal tersebut adalah untuk mendapat **kepercayaan publik**, sehingga hasilnya saat ini terlihat dari okupansi hotel yang sudah meningkat. Beberapa hotel juga menawarkan konsep *staycation*, bahkan Kemenko Maritim dan Investasi merekomendasikan Banyuwangi sebagai destinasi kegiatan pemerintahan yang sangat mendukung berkembangnya sektor pariwisata bagi perekonomian daerah.

Selanjutnya, dalam memasarkan sektor pariwisata di Banyuwangi di masa pandemi, pemkab juga menerapkan **digitalisasi *marketing*** melalui pengembangan aplikasi *Banyuwangitourism App*, sebuah aplikasi yang bisa menjawab kebutuhan wisatawan yang datang ke Banyuwangi (berisi informasi destinasi wisata, Banyuwangi Festival, tamu/kunjungan kerja, kuliner, dll) sehingga mempermudah wisatawan dalam berkunjung.

Lessons Learned

Proses *rebound* pariwisata Kabupaten Banyuwangi tersebut perlu menjadi inspirasi bagi daerah lain. Setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat diambil dari hal tersebut, antara lain:

1 Adaptive Governance

Dalam berbagai studi menunjukkan bahwa *agility* sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan (Beck, et al., 2021). Hal ini ditunjukkan dari kemampuan organisasi dalam merespon perubahan dengan cepat. Pada tahapan selanjutnya proses *agility* ini ditingkatkan dengan *adaptive governance* dimana respon perubahan tersebut dilakukan secara lebih tersistematis (Jansenn & Van der Voort, 2016). Dalam konteks Banyuwangi hal ini terlihat dari perubahan tata kelola pariwisata yang pada awalnya *festival based* berubah menjadi *safety first*, dimana di awal yang dijual adalah atraksi-atraksi, namun selama pandemi ini bergeser ke jaminan kesehatan dimana dilakukan sertifikasi new normal terhadap seluruh UMKM dan stakeholder pariwisata di Banyuwangi. Tentunya strategi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan para stakeholders terkait.

2 Gaining Public Trust

Pelajaran berikutnya adalah tujuan dari perubahan strategi pariwisata Banyuwangi tersebut adalah untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik. Dan di masa pandemi ini untuk mendapatkan kepercayaan publik, maka pemerintah Banyuwangi terus memberikan garansi atau jaminan bahwa semua pendukung sektor pariwisata di Banyuwangi telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dimana hal tersebut merupakan syarat utama dalam mendapatkan sertifikasi dari pemda.

3 Innovation

Selain tata kelola adaptif untuk memulihkan kepercayaan publik, Pemkab Banyuwangi juga terus mendorong berbagai inovasi baru dalam menarik minat wisatawan. Hal ini dilakukan melalui teknologi, baik itu yang digunakan dalam memantau protokol kesehatan pegiat wisata di Banyuwangi maupun sebagai sarana marketing dan informasi pariwisata Banyuwangi.

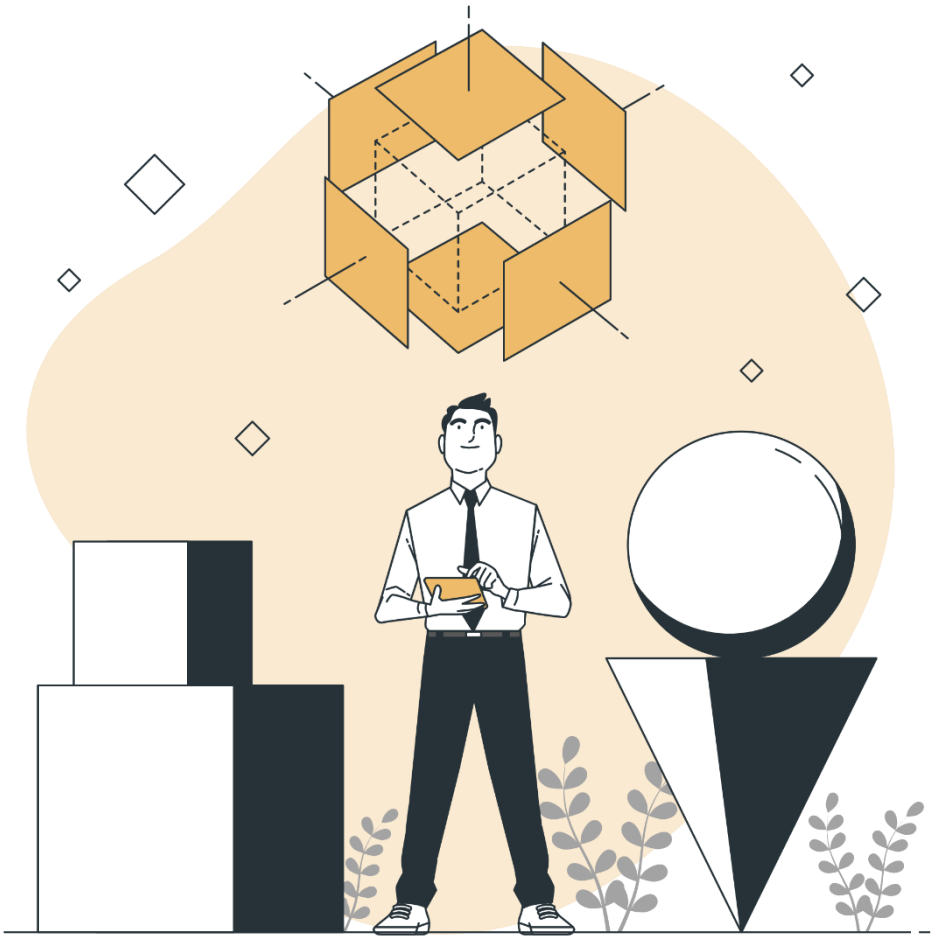

KABAR DAERAH: PARIWISATA

1 LOMBOK BARAT

https://lombokbaratkab.go.id

Kepala desa dan pendamping dari 20 Desa di Lombok Barat mengikuti Pelatihan Desa Wisata untuk meningkatkan kapasitas desa dalam pemberdayaan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Kompetensi yang diberikan meliputi kompetensi bagaimana menata dan mempublikasikan sebuah destinasi wisata sehingga berpengaruh pada kemajuan Desa, ekonomi Desa, dan terbangunnya integrasi sosial masyarakat Desa. Diharapkan pemangku desa juga mampu membangun ekonomi kreatif dengan rajin dan konsisten, sehingga PADes (Pendapatan Asli Desa) dari Pariwisata meningkat.

2 PADANG

https://sumatra.bisnis.com/

Sektor pariwisata di Kota Padang, menaruh harapan yang besar pada tahun ini. Setidaknya 5 juta wisatawan ditargetkan berkunjung sepanjang 2021. Pemkot Padang telah menyusun even pariwisata mulai bulan Februari hingga Desember 2021. Namun semua even itu masih bersifat sementara karena masih melihat perkembangan situasi pandemi. Ada dua even yang dipastikan batal pada Februari 2021, yakni Festival Cap Go Meh dan Serak Gulo. Dengan kesiapan even untuk mengundang 5 juta wisatawan datang ke Padang pada 2021, Pemkot Padang pun menargetkan dapat berdampak kepada pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata memberikan PAD sebesar Rp80 miliar-Rp90 miliar pada 2021.

3 PALEMBANG

https://sumsel.suara.com/

Pemkot Palembang berencana bakal menata ulang kawasan Pulau Kemaro guna menambah daya tarik wisatawan. Untuk melakukan penataan ulang, pada tahun ini Pemkot Palembang membentuk tim percepatan penataan dan pengembangan Pulau Kemaro. Selain menggunakan dana APBD, untuk melakukan penataan dan pengembangan kawasan objek wisata tersebut Pemkot Palembang juga mengajak dan memberikan kemudahan kepada investor yang tertarik menanamkan modalnya untuk membangun tempat hiburan dan fasilitas pendukung industri pariwisata.

4 RAJA AMPAT

https://papua.bisnis.com/

Pemkab Raja Ampat, terus melakukan inovasi pelayanan kunjungan wisatawan berbasis online guna pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya melalui survei kepuasan. Pelayanan ini sebelumnya dilakukan secara manual pada pos pelayanan UPTD Pariwisata sekarang bisa dilakukan secara online. Para operator wisata di Raja Ampat hanya butuh waktu dua menit untuk mengisi formulir survei tingkat kepuasan wisatawan secara online. Raja Ampat di masa pandemi banyak dikunjungi wisatawan domestik yang berlibur. Sejak September destinasi sudah ramai hingga puncaknya Desember 2020. Pengisian formulir survei kepuasan kunjungan ini dimaksudkan agar Pemda mendapat data kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat sebagai bahan evaluasi guna perbaikan pelayanan yang lebih baik.

5 MAJALENGKA

https://jabar.tribunnews.com/

Memasuki awal tahun 2021, Pemkab Majalengka telah menyiapkan berbagai event guna membangkitkan kembali pariwisata. Pada masa penerapan PSBB Proporsional saat ini, Pemkab Mejalengka memperbolehkan industri pariwisata, dan aktivitas ekonomi kreatif kembali beroperasi dengan melakukan berbagai pembatasan, baik waktu maupun pengunjung. Kemudian, Pemkab Majalengka sudah menyiapkan berbagai strategi seperti, peningkatan promosi destinasi wisata Majalengka dan UMKM kuniler khas Majalengka, menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, mendukung perbaikan sarana prasarana di berbagai objek wisata Majalengka, serta membengkali pelaku pariwisata dengan perlengkapan kesehatan.

6 GORONTALO

https://www.indozone.id/

Dalam rangka menjaga kelangsungan pertumbuhan sektor pariwisata di tengah pandemi, Kabupaten Gorontalo Utara mengusung konsep Wisata Tangguh. Langkah awalnya diterapkan di lokasi wisata Pantai Minanga, terletak di Desa Ota Jin Utara. Objek wisata ini merupakan destinasi baru yang sempat ditutup selama lebih kurang 3 pekan terakhir karena insiden pelanggaran protokol kesehatan. Namun, kini telah dibuka lagi untuk umum, pasca pencanangan dengan konsep Wisata Tangguh tersebut. Pantai Minanga diharapkan menjadi destinasi percontohan dalam penerapan protokol kesehatan di daerah ini.

KAJIAN PILIHAN

Pengaruh Belanja Lingkungan Hidup Terhadap Penerimaan Pajak Terkait Pariwisata

Rata-rata kontribusi pendapatan pajak daerah dari 2011-2019 adalah sebesar 70,26% dari total pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (kontribusi PAD terhadap total pendapatan) masih relatif rendah, yaitu rata-rata sebesar 23,09% dalam kurun waktu 2011-2019, di mana rata-rata kemandirian fiskal di kabupaten/kota sebesar 12,4% dan provinsi sebesar 49,13%. Tingkat kemandirian fiskal yang masih relatif rendah, terutama di kabupaten/kota, mendorong adanya upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari PAD, yang utamanya bersumber dari pajak daerah.

70,26%

Rata-rata Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (2011-2019)

23,09%

Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Daerah (2011-2019)

Lise dan Tol (2002) melakukan penelitian yang mempunyai kesimpulan bahwa kondisi iklim mempengaruhi *demand* di sektor pariwisata. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Zeng, et al. (2019) yang menyatakan bahwa kualitas lingkungan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Peningkatan aktivitas di sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, terutama pajak hotel. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari belanja lingkungan hidup di APBD terhadap penerimaan pajak daerah terkait sektor pariwisata, terutama pajak hotel, di pemerintah kabupaten/kota. Hipotesis yang dikembangkan adalah dengan semakin meningkatnya belanja fungsi lingkungan hidup di APBD dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, karena semakin nyamannya kualitas lingkungan di daerah wisata. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya permintaan konsumsi barang/jasa berbasis *tourism*, seperti hotel dan restoran, dan pada gilirannya menaikkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.

Rata-Rata Porsi Belanja Lingkungan Hidup 2011-2019

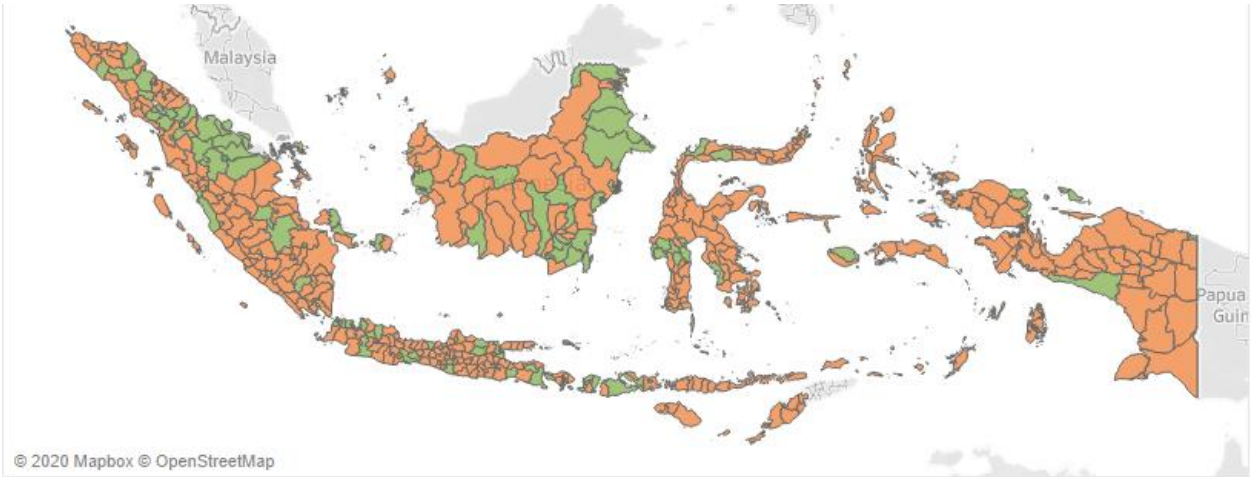

Map based on Longitude (generated) and Latitude (generated). Color shows average of Env Exp Portion. Details are shown for Regions. The data is filtered on Region, which keeps 508 of 542 members.

Avg. Env Exp Portion

-1.14% 10.62%

Box-and-Whisker Plots...

KAJIAN PILIHAN

Pengaruh Belanja Lingkungan Hidup Terhadap Penerimaan Pajak Terkait Pariwisata

Box-and-Whisker Plots Porsi Belanja Lingkungan Hidup 2011-2019

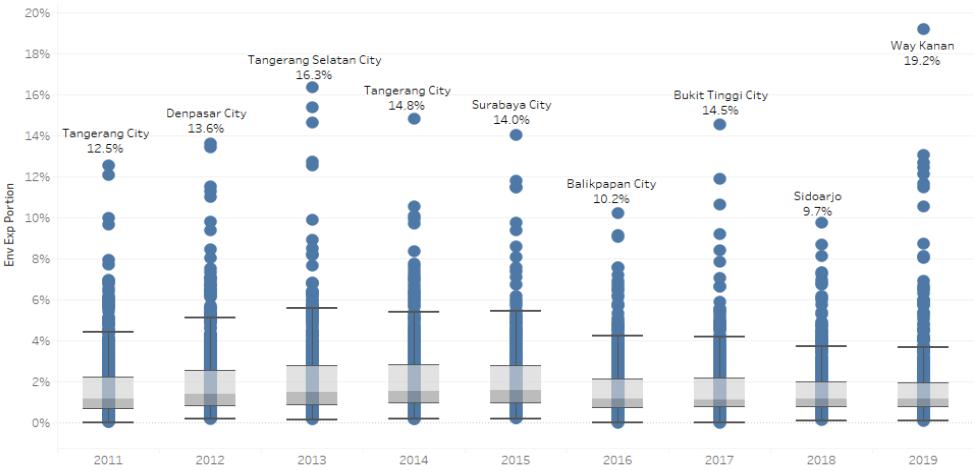

Rata-rata porsi belanja lingkungan hidup di kabupaten/kota selama 2011-2019 hanya sebesar 1,86% dari total belanja. Angka tersebut menunjukkan masih rendahnya prioritas belanja lingkungan hidup di APBD. Sebagian besar daerah yang mempunyai porsi belanja lingkungan hidup cukup tinggi adalah wilayah kota, seperti Kota Tangerang, Kota Denpasar, Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Balikpapan, dan Kota Bukit Tinggi.

Scatter plot antara belanja lingkungan hidup dan pendapatan pajak hotel (dilakukan *scalling* dalam nilai log natural) menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara belanja lingkungan hidup dengan pendapatan pajak hotel.

Scatter Plot – Belanja Lingkungan Hidup dan Pendapatan Pajak Hotel

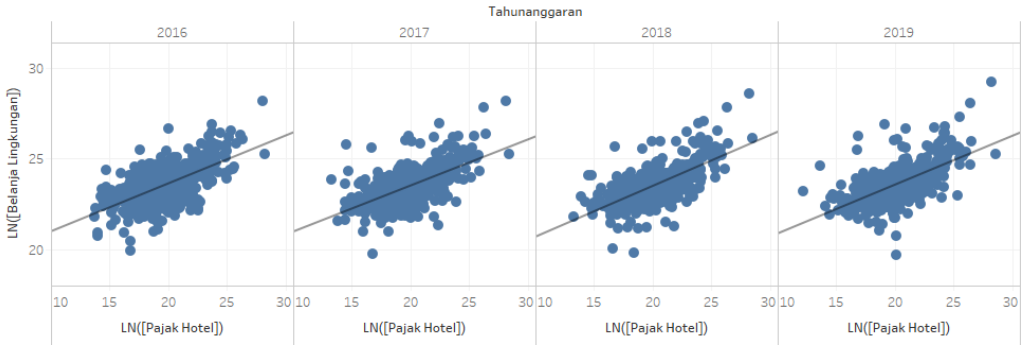

Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel untuk periode data dari 2016-2019 dengan jumlah observasi sebanyak 1.875. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja lingkungan hidup berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pajak hotel. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa kondisi lingkungan yang baik dapat meningkatkan aktivitas di sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak hotel. Belanja lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk implementasi *green development* di APBD. Pengelolaan belanja lingkungan dapat mendorong peningkatan aktivitas di sektor pariwisata, yang pada gilirannya dapat memperkuat pendapatan pajak hotel dan kemandirian fiskal daerah.

Penulis: Arifudin Miftakhul Huda